

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GARUT TAHUN 2013**

Rudi Hermanto

Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
rudihermanto1980@yahoo.com

Affan Sulaeman

Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Dede Sri Kartini

Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

This paper examines the factors that led to the emergence of independent candidates for Election of Regent and Vice Regent of Garut in 2013. The number of candidates who register through independent channels reached 22 candidate pairs with diverse professional and organizational background, after verified 4 pairs of candidates contesting with 46 candidate pairs from political parties / coalitions of political parties. This independent candidate is present amid the political dynamics of Garut, which is always colored by political elite conflict and unusual change of regent due to corruption case and violation of ethics / legislation. By using qualitative approach with interview technique this paper discusses 3 factors that cause the emergence of individual candidate, that is First, institutional factor of weak party party, Second, Factor of recruitment process of exclusive and centralized political party. Third is the circulation factor of local political elites, where individual candidates arise as the new middle class increases, dissatisfaction with public service and civil service, and the barrage of elite political conflicts that occur prior to the election of Garut Regent and Vice Regent of 2013.

***Key words:** independent candidate, political elite, political party, local election*

A. PENDAHULUAN

Pemilu dan Pilkada secara langsung merupakan proses demokratisasi di Indonesia. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena saat Pemilu itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik suatu di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung.

Kabupaten Garut telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) secara langsung sampai saat ini sebanyak kali yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2013. Pada Pilbup Garut Tahun 2008 3 pasangan calon (paslon) dari jalur perseorangan menghadapi 4 paslon dari parpol/gabungan parpol yang berakhir dengan kemenangan paslon Fikri-Dicky Candra dari jalur perseorangan.¹

Kabupaten Garut merupakan daerah dimana dinamika politiknya semarak dan berwarna karena merupakan daerah pertemuan (penghubung) pusat pemerintahan di Bandung dengan daerah lainnya di daerah Priangan Timur. Kondisi ini menyebabkan Garut menjadi pertemuan antara pandangan tradisional yang termanifestasi dalam pesantren-pesantren dan pandangan baru yang dibawa melalui jalur lintas perdagangan.²

Sejumlah kasus menarik berkenaan dengan Bupati Garut sempat mencuat dan menjadi perhatian masyarakat luas. Pada tahun 2007, Bupati Garut Agus Supriadi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus korupsi dan harus menjalani vonis hukuman 7,5 tahun penjara, kemudian oleh wakil bupati pada saat itu yaitu Memo Hermawan. Sedangkan Bupati Garut terpilih pada Pilkada 2008, yaitu Aceng Fikri tersandung kasus hukum berkaitan pernikahan siri dengan anak di bawah umur dan digantikan oleh Agus Hamdani wakil bupati. Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Garut dalam kasus pemakzulan memiliki hubungan erat dengan sirkulasi elit politik lokal, dimana elit politik yang tidak memerintah memanfaatkan momentum tersebut demi pencalonan bupati, dengan mencari popularitas melalui pelengseran Aceng Fikri agar terpilih dalam Pilbup Tahun 2013.

Sebelum kasus pemecatan Bupati Aceng Fikri, terjadi konflik politik antara Bupati Aceng Fikri dan Wakil Bupati Diky Chandra yang berujung pada pengunduran diri Diky Chandra sebagai Wakil Bupati. Konflik elit ini dipicu oleh

1. KPU Kabupaten Garut. (2008). *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 Putaran Pertama di KPU Kabupaten Garut*. Garut : KPU Kabupaten Garut, h 18-19

2. Institute for Strategic Initiatives, (2013). *Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye*. Institute for Strategic Initiatives, h 24

ketidaksepahaman mengenai penentuan kebijakan dan pembagian kewenangan diantara mereka, konflik menghadapi birokrasi lokal, ditambah dengan keputusan Aceng Fikri untuk bergabung dengan Partai Golkar ketidaksepahaman mengenai penentuan kebijakan dan pembagian kewenangan diantara mereka, konflik menghadapi birokrasi lokal, ditambah dengan keputusan Aceng Fikri untuk bergabung dengan Partai Golkar.³

Pelembagaan parpol yang lemah di Kabupaten Garut terlihat dari perolehan kursi yang selalu berubah tiap kali Pemilu. Pemenang Pemilu Tahun 2004 adalah Partai Golkar (14 dari 45 kursi). Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009, Partai Demokrat keluar sebagai pemenang Pemilu (10 dari 50 kursi). Pada Tahun 2014 Partai Golkar menang kembali 8 dari 50 kursi, disusul oleh PDIP dan PPP dengan perolehan masing-masing 6 kursi. Sementara Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu sebelumnya hanya mendapat 5 kursi.

Parpol dinilai lamban dalam proses rekrutmen kandidat calon bupati dan wakil bupati. Selain masih mencari calon ideal, nampak sulit pula untuk membuka komitmen politik dengan calon yang melamarnya. Perjalanan Rudi Gunawan ketika mencari gerbong parpol yang cukup terseok-seok. Partai Golkar yang semula menjadi pelabuhan ternyata menutup rapat. Kemudian Rudi mencoba mengetuk pintu PAN dan melamar Partai Demokrat, namun terhempas karena masing-masing parpol lebih memilih kadernya sendiri. Akhirnya ia diusung oleh PBB dan Partai Gerindra.⁴

Calon perseorangan adalah mereka yang tidak berafiliasi dengan partai politik, memiliki dukungan organisasi dan keuangan yang signifikan serta popularitas yang kuat. Tidak berafiliasi berarti bahwa nama calon perseorangan muncul sendirian di surat suara, tidak bersama parpol tertentu. Dengan demikian,

³. Adhima, M R & Bahri, S. (2013). *Konflik Politik dalam Pemerintahan Lokal : Studi Kasus Pengunduran di Wakil Bupati Jalur Perseorangan di Kabupaten Garut Tahun 2011*. Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Diakses 11 Desember 2017, dari: https://slidedokumen.com/konflik-politik-dalam-pemerintahan-lokal-studikasus_5a19729f1723dda0ebdf42fb.html.

⁴. Ansori, T. (2014). *Lipatan Sejarah Menuju Pendopo Tahun 2013, Dalam KPU Kabupaten Garut. 2014. Dialektika Pemilu Bupati Garut Tahun 2013*. Garut : KPU Kabupaten Garut, h 178-179

calon perseorangan tidak mengikuti platform parpol tertentu.⁵ Menurut Bochel dan Denver calon perseorangan adalah mereka yang sengaja menghindari label partai dan menggambarkan diri mereka sebagai perseorangan dalam surat suara pada pemilu. Dari kedua pandangan tentang calon perseorangan, terdapat persamaan dari pengertian calon perseorangan, yaitu non-parpol, tidak berafiliasi atau memakai label parpol dalam pencalonan jabatan politik.⁶

Di Indonesia, penggunaan kata individu (perseorangan) bagi calon kurang lebih sama dengan penggunaan kata independen dalam penelitian lain, khususnya dalam literatur asing. Calon perseorangan merujuk pada terminologi resmi pejabat dari sistem pemilu di Indonesia. Meskipun, peraturan Pilkada (UU No. 10/2016) sebenarnya hanya menetapkan bahwa calon perseorangan kepala daerah yang didukung oleh sejumlah orang, atau mekanisme pencalonan dilakukan di luar partai politik.⁷

Mainwaring dan Torcal mendefinisikan pelebagaan sebagai “proses di mana suatu praktek atau organisasi menjadi mapan dan dikenal luas, jika tidak diterima secara universal”.⁸ Dalam politik pelebagaan berarti bahwa aktor politik memiliki harapan yang jelas dan stabil mengenai perilaku aktor-aktor lain. Selanjutnya, Mainwaring dan Torcal mengkonseptualisasikan empat dimensi pelebagaan sistem kepartaian, yaitu *Pertama*, sistem yang terlebaga mewujudkan stabilitas yang cukup besar dalam pola persaingan partai. *Kedua*, dalam sistem yang melebaga partai memiliki akar yang kuat di masyarakat dan sebagian besar pemilih, demikian pula sebaliknya masyarakat dan pemilih

5. Brancati, D. (2008). Winning Alone: The Electoral Fate of Independent Candidates Worldwide. *The Journal of Politics*, h 650

6. Bochel, H & Denver, D. (2008). Minor Parties and Independent in Times of Change : Scottish Local Elections 1974 to 2007, *Local Government Studies*, h 579-580.

7. Thaha, Rasyid & Haryanto, (2017). Independent Candidate in the Concurrent Regional Election in South Sulawesi : What is Independent and Why ?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, h 223-224

8. Mainwaring, S & Torcal, M. (2014). Institusionalisasi Sistem Partai dan Teori Sistem Partai Setelah Demokratisasi Gelombang Ketiga. Dalam Katz, RS & Crotty, W. *Handbook Partai Politik*. Bandung : Nusa Media, h 339

memiliki keterikatan yang kuat pada partai. *Ketiga*, aktor politik menyesuaikan legitimasi dengan partai, dan *Keempat*, organisasi partai tidak tunduk pada kepentingan dari segelintir pemimpin yang ambisius. Ketika partai yang sukses dalam pemilu menjadi kendaraan personalistik, pelembagaan tingkat sistem rendah pada keempat dimensi ini.⁹

Menurut Surbakti rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁰ Hazan dan Rahat (2014 : 180-185) menjelaskan prosedur untuk mengklasifikasikan metode seleksi calon ini didasarkan pada 4 kriteria, yaitu :¹¹

- a. Selektorat, adalah badan yang menyeleksi calon, yang merupakan aktor penting dalam proses perekrutan. Selektorat dapat beranggotakan satu orang atau banyak orang, hingga seluruh pemilih dalam suatu bangsa tertentu.
- b. Pencalonan, membahas pertanyaan tentang siapa yang dapat menampilkan dirinya sebagai calon dari partai tertentu. Digambarkan juga dalam kontinum dari inklusif ke eksklusif.
- c. Desentralisasi, bisa bersifat teritorial yakni ketika selektorat parpol lokal mencalonkan calon parpol, misalnya seorang pemimpin lokal, semua anggota parpol atau pemilih di suatu daerah pemilihan.
- d. Voting versus Penunjukan, biasanya terjadi dalam selektoral yang lebih kecil dan lebih eksklusif, calon diangkat, sementara selektorat besar biasanya melakukan voting untuk memilih calon mereka.

Mosca mengembangkan teori sirkulasi elit dengan menjelaskan karakteristik yang membedakan elit, yaitu "kecakapan untuk memimpin dan menjalankan

⁹. Mainwaring, S & Torcal, M. (2014). *Institusionalisasi Sistem Partai dan Teori Sistem Partai Setelah Demokratisasi Gelombang Ketiga*. Dalam Katz, RS & Crotty, W. *Handbook Partai Politik*, h 339-341

¹⁰. Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, h 118

¹¹. Hazan, RY & Rahat, G. (2014). *Seleksi Calon : Metode dan Konsekuensi*. Dalam Katz, Richard S & Crotty, William. *Handbook Partai Politik*. hal. 178-185. Bandung : Nusa Media, h180-185

kontrol politik”, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terbukalah kemungkinan kelas yang berkuasa dilengserkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Jika elit tidak memberikan pelayanan yang diperlukan oleh massa atau terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, maka perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.¹²

Meskipun cukup banyak penelitian telah dilakukan mengenai calon perseorangan, sulit untuk menemukan jawaban mengenai munculnya calon perseorangan pada tingkat mikro atau tingkat kabupaten/kota. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebagian besar memberikan pengamatan di tingkat makro mengacu pada sistem pemilihan dan lembaga-lembaga demokratis.¹³ Gendzwill meneliti bagaimana sistem distrik menguatkan calon perseorangan lokal dan memperkuat walikota dalam reformasi sistem pemilu dalam pemerintahan lokal Polandia.¹⁴ Lalu Ishiyama menyelidiki bagaimana partai memonopoli saluran mobilitas ke atas untuk calon politisi dengan mengurangi jumlah calon perseorangan di tiga negara sub-Sahara Afrika (Ghana, Malawi dan Zambia) dan faktor dukungan partai yang memerintah pada keputusan calon perseorangan untuk mencalonkan diri.¹⁵ Selanjutnya Brancati meneliti aspek-aspek dari sistem pemilu yang mempengaruhi calon perseorangan di 34 negara di seluruh dunia antara tahun 1945 dan 2003.¹⁶

¹². Varma, SP. (1999). *Teori Politik Modern*. Jakarta : Rajawali Pers, h 203

¹³. Thaha, Rasyid & Haryanto, (2017). Independent Candidate in the Concurrent Regional Election in South Sulawesi : What is Independent and Why ?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, h 223

¹⁴. Gendzwill, A. (2012). Independent Mayors and Local List in Large Polish Cities : Towards a Non-partisan Model of Local Government. *Local Government Studies* 38, h 501-518.

¹⁵. Ishiyama, J, Anna B., & Angela S. (2011). Political Parties, Independents and the Electoral Market in sub-Saharan Africa”. *Party Politics* 19, h 695-712.

¹⁶. Brancati, D. (2008). Winning Alone: The Electoral Fate of Independent Candidates Worldwide . *The Journal of Politics* 70, h 648-661.

Terdapat beberapa penelitian atau studi tentang calon perseorangan yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia, diantaranya : *Pertama*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Thaha dan Haryanto (2017) tentang Calon Perseorangan pada Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitiannya mengungkapkan alasan tiga calon perseorangan (di Kabupaten Pangkep Kepulauan, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bulukumba) memilih jalur perseorangan pada Pilkada Serentak tahun 2015, modal apa yang mereka miliki, mengapa beberapa kandidat lebih berpengaruh/memenangkan pemilihan dan konsekuensi kehadiran mereka bagi demokrasi di Indonesia. *Kedua*, adalah penelitian Harahap (2013) tentang Politik Kepala Daerah Perseorangan Memperbesar Kekuasaan. Dalam kajiannya di Kabupaten Batubara beliau mengulas kesuksesan Kepala Daerah dari calon perseorangan OK Arya Zulkarnaen dalam memperbesar kekuasaannya di tahun pertama pemerintahannya, dengan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batu bara periode 2010-2015. *Ketiga*, Ulfah (2012) tentang Calon Perseorangan dalam Pemilihan di Kabupaten Pati Tahun 2011. Dalam penelitiannya beliau menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan calon perseorangan dalam Pemilihan Kabupaten Pati tahun 2011. *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2010) tentang Implikasi Calon Perseorangan sebagai Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya dalam hubungan Kepala Daerah dan DPRD tidak hanya terkait dengan sistem pemerintahan daerah yang berlaku, akan tetapi juga ditentukan oleh *leadership* dari kepala daerah itu sendiri. Berdasarkan uraian yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya calon perseorangan pada Pilbup Garut Tahun 2013.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kasus, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan secara empiris faktor-

faktor yang menyebabkan munculnya calon perseorangan pada Pilbup Garut Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan. Data sekunder yang dijaring adalah melalui studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Wawancara dilakukan terhadap calon perseorangan, pengurus partai politik, komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Garut serta pengamat di Kabupaten Garut. Data hasil penelitian dianalisa menggunakan analisis deskriptif yang kemudian ditafsir dengan teori dan konsep yang ada. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Pelembagaan Partai Politik yang Lemah di Kabupaten Garut

Pelembagaan parpol di Kabupaten Garut menjelang Pilbup Garut Tahun 2013 cenderung lemah sehingga memunculkan banyak calon perseorangan. Pelembagaan parpol yang lemah ini ditandai. *Pertama*, ketidakstabilan persaingan antar partai politik. Pelembagaan parpol dikatakan baik jika pola persaingan parpolnya berjalan stabil, dimana angka votalitas pemilunya rendah. Votalitas pemilu mengacu pada perolehan agregat dari satu partai ke partai lain dari satu pemilu berikutnya. Dihitung dengan menambahkan perubahan bersih persentase suara yang diperoleh atau hilang dari masing-masing partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, kemudian membaginya dengan dua. Pasca reformasi 1998, secara kuantitas parpol bertambah banyak dengan perolehan suara yang berbeda dari tiap pemilu. Perolehan suara parpol untuk DPRD Kabupaten Garut dari pemilu ke pemilu lainnya selalu mengalami perubahan drastis, pada tabel 1 terlihat votalitas pemilu di Kabupaten Garut dari Pemilu 2004-2014.

Tabel 1 Votalitas Pemilu 2004-2014

NO	PARPOL	2004	2009	2014	NAIK/TURUN		HASIL
					2004-2009	2009-2014	
1	Golkar	29.52	13.82	16.81	-15.7	2.99	9.35
2	PDIP	10.45	9.05	11.81	-1.4	2.76	2.08
3	PPP	19.34	11.26	11.71	-8.08	0.45	4.27
4	PKB	9.70	4.63	9.83	-5.07	5.2	5.14
5	Demokrat	3.51	18.55	8.63	15.04	-9.92	12.48
6	PKS	8.07	8.05	7.96	-0.02	-0.09	0.06
7	PAN	7.63	7.74	8.31	0.11	0.57	0.34
8	PBB	4.16	3.42	4.03	-0.74	0.61	0.68
9	Gerindra	-	3.34	6.2	-	2.86	1,43
10	Hanura	-	4.76	8.35	-	3.59	1,79
11	Nasdem	-	-	5.01	-	-	-

Sumber : KPU Kabupaten Garut, tahun 2014.

Tabel 1 memperlihatkan votalitas pemilu 2004-2014 tertinggi di Kabupaten Garut terjadi di dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar, dibandingkan parpol lain. Untuk Partai Nasdem belum bisa dihitung karena baru mengikuti satu pemilu. PKS dan PAN mempunyai tingkat votalitas pemilu yang rendah, dimana kenaikan dan penurunan suara mereka tidak terlalu besar. Votalitas pemilu disebabkan oleh beralihnya suara pemilih ke partai lain. Hal tersebut terjadi karena adanya perpecahan atau konflik di internal parpol dan citra yang buruk dari parpol. Partai Demokrat mengalami lonjakan kenaikan perolehan suara pada pemilu 2009 sebesar 15,04% disebabkan oleh elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono, namun kemudian suaranya menurun 9,09% pada pemilu 2014 akibat turunnya kepercayaan masyarakat karena banyak kadernya terjerat kasus korupsi, belum terkonsolidasinya parpol dan figur calon yang lemah.

Partai Golkar pun mengalami penurunan suara pada pemilu 2009 lebih dari setengah suara (15,7%) pada pemilu 2004, diakibatkan oleh perpecahan di tubuh elit parpol Golkar yang kemudian membentuk partai baru yaitu Hanura dan Gerindra. Tapi berkat kerja calegnya untuk mensosialisasikan diri dan parpolnya, suara Golkar kemudian naik 2,99 %.

Kedua, Parpol belum mengakar di masyarakat. Parpol-parpol di Kabupaten Garut cenderung memiliki akar yang lemah di masyarakat, jika melihat angka votalitas pemilu pada tabel 5.1 diatas, dimana pemilih seringkali beralih pilihan dari satu parpol ke parpol lainnya. Loyalitas pemilih pada parpol begitu lemah, meskipun pemilih loyalis parpol tetap ada.

Hasil survey yang diselenggarakan oleh Lingkar Survey Indonesia pada tahun 2011 dan 2015 mengindikasikan juga hubungan yang lemah antara parpol dan pemilihnya. Pada tahun 2011 lebih dari 75% masyarakat menyatakan tidak merasa dekat dengan parpol tertentu, angka ini meningkat pada tahun 2015, dimana 83% lebih pemilih di Indonesia tidak memiliki perasaan kedekatan dengan parpol.¹⁷

Selanjutnya untuk menilai hubungan parpol dengan masyarakat penulis membandingkan perolehan suara Pilbup Garut Tahun 2013 dengan perolehan suara parpol pada Pemilu 2009 pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Perolehan Suara Pilbup Garut Tahun 2013 Putaran 1 dengan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2009

No	Nama calon	Pendukung	Jumlah Dukungan	Jumlah Suara	Selisih
1	Dedi Suryadi Deddy Dores S	Perseorangan	112,480	59,577	-52,903
2	Yamin S Dadan Ramdani	Perseorangan	104,288	55,700	-48,588
3	Sirojul Munir Iwan Suwarsa	Perseorangan	107,733	42,220	-65,513
4	Memo H Ade Ginanjari	PDIP dan Golkar	249,687	194,752	-54,935
5	Agus Hamdani Abdusy Syakur	PPP dan PKB	173,529	251,617	78,088
6	Nadiman Kholil Aksan U	PKNU, PPNUI	91,826	43,779	-48,047
7	Saeful Anwar Serli	PAN dan	136,470	92,237	-44,233

¹⁷ . Budiarti, AP. (2015). The Institutionalization of Political Party System Under Democratic System In Indonesia (1998-Now). *Jurnal Penelitian Politik* 12, h 33-54.

	Besi	Hanura			
8	Rudi Gunawan Helmi Budiman	Gerindra, PKS dan PBB	161,662	256,323	94,661
9	Ahmad Bajuri An An K	Demokrat	202,571	52,031	-150,540
10	Dede Kusdinar Endang S	Perseorangan	104,424	58,091	-46,333

Sumber : KPU Kabupaten Garut, tahun 2014.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa hubungan parpol dengan masyarakat tidak begitu kuat, dimana tidak semua konstituen parpol pada pemilu 2009 memilih kandidat bupati yang diusung oleh parpol pilihannya. Perbedaan perolehan suara cukup mencolok di mayoritas parpol. Selisih perbedaan suaranya antara 40 ribu-150 ribuan. Selisih tertinggi adalah Partai Demokrat dengan - 150,540 suara. Sementara perolehan suara paslon yang cukup tinggi, melampaui perolehan suara pemilu 2009, adalah paslon Rudi Gunawan - Helmi Budiman, yang didukung gabungan parpol Gerindra, PKS dan PBB dengan selisih suara + 94,661 serta paslon Agus Hamdani - Abdusy Syakur Amin yang didukung gabungan parpol PPP dan PKB dengan selisih suara + 78,088. Selisih yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa hubungan parpol dengan masyarakat lemah di Kabupaten Garut. Demikian juga dengan calon perseorangan, tidak ada paslon yang memperoleh suara cukup tinggi, rata-rata hanya mencapai setengah dari jumlah dukungan.

Elit parpol sendiri menilai bahwa parpol telah memiliki hubungan yang cukup baik dengan masyarakat, melalui proses interaksi yang formal dan non-formal oleh pengurus PAC sampai ranting, termasuk oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses. Namun, keterikatan dengan ideologi dan program parpol dinilai lemah tergantung bagaimana kader parpol yang menjadi anggota DPRD mengimplementasikan tupoksinya sebagai dewan di lapangan. Parpol dinilai belum mewakili kepentingan pemilih/masyarakat. Terdapat ketidakpuasan masyarakat karena keberpihakan terhadap masyarakat sebagaimana dijanjikan tidak maksimal selama ini. Menurut calon perseorangan Sirojul Munir

“Masyarakat akan mempercayai parpol karena janjinya, akan tetapi janji politik dari tiap partai politik belum bisa terpenuhi secara maksimal”.

Secara umum calon perseorangan menganggap masyarakat Garut kurang memiliki keterikatan ideologis dan program dengan parpol tertentu, parpol yang dianggap memiliki keterikatan ideologi yang cukup kuat dengan pemilih adalah PPP, PKS dan PDIP. Pada saat pemungutan suara Pilbup Garut 2013 terlihat kecenderungan pemilih untuk memilih berdasarkan kualitas personalistik calon daripada melihat ideologi dan program parpol pendukungnya. Hasil Pilbup tidak berbanding lurus dengan perolehan suara parpol pada saat Pileg, dimana fokus utama adalah calon bupati. Kualitas calon mengalahkan dukungan parpol pengusung, Partai Gerindra pengusung calon bupati terpilih Rudy Gunawan yang hanya memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Garut pada tahun 2013, dengan koalisi bersama PKS (5 kursi) dan PBB (2 kursi) dapat mengalahkan paslon yang diusung partai besar PDIP (6 kursi) dan Partai Golkar (7 kursi).

Pada saat pilbup yang bermain itu adalah figur calon. Menurut Ketua Bapilu DPC Partai Hanura Kabupaten Garut Tahun 2013 Agus Hilman “Parpol hanya mensahkan saja pencalonan, sebagai kendaraan saja, karena setelah mereka dapat kendaraan atau tiket pencalonan parpol pengusung ditinggal”. Faktor figur di Kabupaten Garut sangat menentukan. Pendapat serupa dikemukakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Garut Tahun 2013 Yogi Yudawibawa, “ Karena figuritas calon masyarakat memilih siapa saja, tidak sinergi dengan ideologi/program parpol. Jika ada sinergi masyarakat akan memilih berdasarkan parpol, maka saat Pilbup Tahun 2013 paslon Memo-Ade pasti menang jika pemilih yang memilih PDIP dan Golkar, memilih kembali calon yang diusung parpol tersebut”. Terdapat kelemahan parpol dalam pengorganisasian dan kepengurusan. Masih banyak *floating mass*, yang dianggap oleh calon perseorangan sebagai peluang/ potensi ditengah-tengah masyarakat.

Ketiga, legitimasi parpol yang lemah. Secara historis parpol di Indonesia selalu mengalami konflik, yang berujung pada perpecahan internal parpol dan pembentukan parpol baru. Konflik di internal parpol di Kabupaten Garut, terjadi tidak hanya di parpol lama, tapi juga di parpol baru. Menjelang Pileg Tahun 1999 sempat terjadi konflik ditubuh PPP, timbul kericuhan sampai kaca kantor DPC PPP dipecahkan, tapi tidak sebesar di tahun 2004 sampai kantor DPC PPP terbakar. Terbakarnya kantor DPC PPP tersebut dipicu oleh ketidakpuasan kader terhadap penyusunan calon anggota legislatif¹⁸. Aksi unjuk rasa dan pengrusakan Kantor DPC Partai Demokrat, pernah terjadi pada tanggal 7 Juni 2013 sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pengurus partai dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Garut Ahmad Bajuri yang belum mau mundur meski masa jabatannya sudah habis, permasalahan anggaran, penetapan caleg yang dianggap mementingkan kelompok tertentu, tersingkirnya kader oleh orang-orang baru yang berduit untuk menduduki jabatan penting di Partai Demokrat, serta kekecewaan terhadap pengurus DPC yang tak pernah melakukan konsolidasi program atau kegiatan kepada para kader, termasuk saat menghadapi Pilbup Garut Tahun 2013.¹⁹ Di awal pendirian Partai Hanura sudah terjadi konflik, sebagai tanda dinamika yang hidup dan menarik ditubuh parpol. Begitu juga pada saat peralihan ketua umum cabang dari mulai Nadhiman sampai Serli. Begitu pula di tubuh PDIP Kabupaten Garut, menurut Yogi Yudawibawa konflik diakui ada tapi tidak sampai mencuat ke permukaan. Konflik tersebut biasanya terjadi pada saat perebutan kursi ketua PAC dan pengkondisian PAC menjelang Muskercab.

Salah satu faktor penyebab munculnya calon perseorangan pada Pilbup Garut Tahun 2013 adalah adanya perpecahan internal parpol pada saat penetapan calon bupati. Dedi Suryadi, salah satu calon perseorangan memutuskan untuk maju sebagai calon perseorangan setelah kalah bersaing dengan Agus Hamdani

¹⁸Sumber:<https://www.liputan6.com/news/read/70592/kantor-dpc-ppp-garut-dibakar>. Diakses 31 Mei 2018.

¹⁹Sumber:<https://www.viva.co.id/berita/politik/419091-kader-partai-demokrat-garut-segel-kantor-dpc>. Diakses 31 Mei 2018.

untuk maju sebagai calon bupati yang diusung PPP. Menurutnya pada saat itu tidak ada ketidaksepakatan tentang bagaimana menentukan calon bupati, dirinya sebagai Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat sudah meminta Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin untuk melakukan mekanisme konvensi untuk memilih calon bupati, seperti pernah dilakukan PPP Kabupaten Garut pada tahun 2003 dan 2008.

Menurut Crouch (2004) situasi *post-democracy*, selain terjadi pergeseran aktor politik muncul dua fenomena penting mengenai hubungan parpol dan masyarakat, yaitu : *Pertama*, meningkatnya skeptisme masyarakat terhadap politik. Parpol dan politisi dianggap tidak lagi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka. *Kedua*, munculnya fenomena makin melebarnya jarak antara parpol dan masyarakat. Fenomena ini tidak sekedar dipicu oleh ketidakpuasan terhadap parpol, namun juga karena lepasnya ketergantungan parpol pada komunitas pendukung yang selama ini menopang kegiatannya, termasuk kebutuhan finansial. Bila dulu parpol tergantung pada sumbangan kader dan sukarela, sekarang tergantung pada dana negara dan pengusaha.²⁰

Kedua hal tersebut terjadi di Kabupaten Garut, *Pertama*, terdapat skeptisme di masyarakat, karena partai tidak memperbaiki diri dan komunikasi yang dilakukan terhadap masyarakat tidak berjalan sepanjang masa. *Kedua*, tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit politik dan parpol meluntur, disebabkan parpol tidak memenuhi keinginan pemilih, parpol selalu mengingkari janji politik pada masa kampanye, dan parpol relatif kecil pembelaannya terhadap kasus-kasus yang dialami rakyat. Menurut pengamat Jusman Iskandar, "Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol mungkin tidak sampai 50%. Oleh karena itu orang memilih parpol antara pusat, provinsi dan kabupaten belum tentu sama, tidak parallel".

Munculnya banyak calon perseorangan menurut Yogi Yudawibawa tidak terlepas dari adanya sebagian besar masyarakat yang tidak mempercayai parpol

²⁰ . Noor, Firman. (2007). Fenomena Post Democracy Party di Indonesia : Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik, dan Dampaknya. *Jurnal Penelitian Politik* 10, h 111

yang ditangkap oleh calon perseorangan sebagai peluang. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut misalnya disebabkan oleh rekrutmen parpol yang buruk. Pergeseran orang dari satu partai ke partai yang lain menandakan tidak adanya kepercayaan terhadap parpol. Pragmatisme masyarakat yang cukup tinggi memperlihatkan ketidakpercayaan pada parpol. Dedi Suryadi mengemukakan "Dalam konteks Pilbup Garut Tahun 2013, jika kepercayaan kepada parpol masih tinggi Pilbup Garut Agus Hamdani haruslah jadi pemenang, atau Ahmad Bajuri dari Partai Demokrat sebagai pemegang 10 kursi di DPRD Kabupaten Garut".

Dede Kusdinar sebagai calon perseorangan mengemukakan salah satu alasan dirinya maju dari jalur perseorangan dikarenakan ketidakpercayaannya pada institusi parpol. Ia melihat fenomena keterpilihan Aceng Fikri pada Pilbup Tahun 2008 karena masyarakat Garut pada saat itu kurang mempercayai parpol, apalagi banyak anggota DPRD Kabupaten Garut terkena kasus korupsi, begitu juga Bupati Garut Agus Supriadi.

Keempat, dominannya kepentingan personalistik pemimpin parpol. Pola rekrutmen jabatan struktural parpol ditingkat lokal akan menentukan tingkat pelembagaan parpol. Calon perseorangan di Kabupaten Garut menganggap pengisian jabatan struktural di parpol rata-rata masih berdasarkan kedekatan, belum berdasarkan keahlian. Mayoritas elit parpol pun mengakui bahwa pengisian jabatan parpol belum dilakukan berdasarkan keahlian. Masih berdasarkan kedekatan emosional. "Pimpinan parpol merasa kesulitan untuk mengisi formasi jabatan-jabatan di struktural DPC berdasarkan prinsip "*the right man in the right place*". Misalnya saja untuk jabatan ketua bidang kesehatan masyarakat, untuk mengisi itu paling tidak penyuluh kesehatan", kata Ketua DPC PPP Kabupaten Garut Lucky Lukmansyah. Ketergantungan pada pimpinan pusat parpol untuk penentuan jabatan struktural di DPC parpol lebih terlihat lagi di Partai Gerindra, dimana untuk setiap tingkatan pengurus DPD, DPC Kabupaten/Kota, PAC, dan ranting sifatnya penunjukan. Secara umum masih terdapat ketergantungan parpol di Kabupaten Garut pada figur personal

pemimpin atau sekelompok elit parpol dalam pengambilan keputusan.

Parpol memiliki ketergantungan yang tinggi pada pengurus pusat, untuk memutuskan sesuatu harus berkonsultasi dulu apa kemauan pengurus pusat, misalnya dalam pencalonan. Demokratisasi di tubuh parpol tidak berjalan, hal ini menyebabkan kader parpol yang mempunyai elektabilitas tinggi terkadang disisihkan oleh orang baru yang bukan kader karena mempunyai modal finansial. Menurut penulis dominannya kepentingan personalistik pimpinan parpol, ditingkat pusat maupun lokal dalam pembuatan keputusan strategis seperti rekrutmen kepemimpinan parpol dan rekrutmen calon kepala daerah membuat calon kandidat yang berasal dari luar partai merasa tidak punya kesempatan untuk berkompetisi dengan calon kandidat yang berasal dari internal parpol, akhirnya mereka memilih untuk mencalonkan diri dari jalur perseorangan.

2. Faktor Proses Rekrutmen Calon yang Eksklusif dan Sentralistik

Pimpinan parpol di Kabupaten Garut pada umumnya mengklaim bahwa proses rekrutmen calon bupati dan wakil bupati pada Pilbup Garut Tahun 2013 telah dilakukan secara terbuka, tidak hanya anggota dan kader parpol yang dapat mendaftar, orang luar parpol pun diperkenankan untuk mendaftar sebagai kandidat calon bupati dan wakil bupati. Tetapi, “ketika ada kader yang dianggap mampu itu yang diutamakan”, kata Lucky Lukmansyah. Calon perseorangan Sirojul Munir menyatakan bahwa “Di parpol sudah ada keterbukaan tapi mayoritas calon dari internal. Walaupun di eksternal ada calon yang lebih bagus, yang internal lebih didahulukan”. Terkait mekanisme rekrutmen di parpol menurutnya “belum transparan, kriteria yang dikehendaki *kayak* bagaimana oleh partai in tidak jelas sampai saat ini”. Dedi Suryadi juga berpendapat bahwa “mekanismenya tidak jelas, seharusnya dilakukan secara musyawarah, tidak ada yang melalui mekanisme bawah”.

Terdapat permasalahan pada kultur dan regulasi dalam rekrutmen kandidat kepala daerah yang dilakukan oleh parpol. Kultur partai yang belum demokratis

menyebabkan adanya sekat, penghambat orang luar untuk bisa mencalonkan diri melalui jalur parpol. Mekanisme rekrutmen setiap parpol telah diatur dalam Peraturan Organisasi atau Petunjuk Pelaksanaan Parpol sebagai turunan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol. Seperti pada Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut mengemukakan rekrutmen calon kepala daerah ada dalam Peraturan Organisasi Nomor 6 yang diputuskan oleh DPP partai Golkar. Dimana mekanisme rekrutmen memprioritaskan kader/ketua partai dan survei. Seperti halnya Partai Golkar, PDIP memiliki mekanisme yang hampir sama dalam pencalonan Kepala Daerah, dimana DPP PDIP mengeluarkan Peraturan Partai tentang Penjaringan Pilkada. "DPC PDIP Kabupaten Garut hanya memiliki kewenangan untuk penjaringan (pendaftaran) bakal calon bupati dan wakil bupati, melalui DPD Provinsi Jawa Barat hasil penjaringan diberikan kepada DPP PDIP untuk diseleksi", kata Yogi Yudawibawa.

Partai Gerindra memiliki mekanisme serupa untuk menyeleksi kandidat calon kepala daerah dimana DPC membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah, setelah diverifikasi secara administrasi oleh DPC dan DPD baru diserahkan kepada DPP. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Garut Enan " Di Partai Gerindra tidak ada semacam konvensi, kita hanya membuka pendaftaran saja, dari internal/eksternal partai silahkan saja asal memenuhi persyaratan, yaitu memiliki loyalitas terhadap partai dan memiliki elektabilitas yang dilihat dari survei internal partai". Demikian pula dengan Partai Hanura, menurut Agus Hilman pendaftaran dibuka ditingkat DPC untuk kemudian direkomendasikan ke DPP. Sedikit berbeda dengan parpol lain, menurut Lucky Lukmansyah PPP memutuskan calon kepala daerah pada forum Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) setelah mengadakan survei secara formal dan informal.

Isu mahar politik menjadi salah satu penyebab munculnya calon perseorangan, Dedi Suryadi salah satu calon perseorangan yang berasal dari PPP, menjelaskan "Kalau tidak ada kejadian (mahar politik) mungkin tidak ada independen. karena mereka tahu saya masuk PPP itu ideologis sekali. Jadi meraka

tahu saya ngak akan mau bayar-bayaran”.

Parpol tingkat lokal tidak memiliki otonomi, keputusan tersebut diputuskan secara sentralistik oleh pengurus pusat parpol. Menurut Dedi Suryadi PAC parpol pada tahun 2013 tidak punya otonomi, berbeda dengan waktu ia menjadi Ketua PAC. PAC mempunyai otonomi, lebih berdaya, partisipasi dibuka dan parpol masih mendengarkan aspirasi dari bawah.. Sirojul Munir memiliki pandangan yang serupa bahwa “Parpol kelihatannya ketergantungan ke pusat, karena ditekan. Kalau tidak mendukung yang diusung partai ini dikeluarkan dari keanggotaannya. Masih ada sentralisasi di partai, mereka takut”. Begitu pula Jusman Iskandar berpandangan bahwa “Parpol lokal tidak memiliki ada otonomi, jadi sentralistik. Sentralistik buruk artinya mematikan partisipasi, mematikan otonomi, mematikan prakarsa, mematikan kreativitas dan mematikan budaya lokal masyarakat”. Kemudian menurutnya parpol-parpol di Garut cenderung bertentangan dengan demokratisasi yang diatur oleh konstitusi. *Pertama*, parpol tidak bersifat desentralisasi, tapi sentralisasi. Sentralistik parpol menyebabkan hubungan-hubungan antara pemilih dengan parpol tidak berjalan dengan baik karena tidak bisa merespon aspirasi dan keinginan pemilih. Parpol tidak bisa mengakomodasikan kepentingan pemilih karena yang memutuskan itu adalah bukan partai lokal atau pengurus lokal tapi pengurus pusat yang tidak tahu apa-apa tentang Garut, misalnya dalam pencalonan. *Kedua*, parpol tidak melakukan rekrutmen terbuka, tetapi dari kedekatan-kedekatan hubungan politik. *Ketiga*, parpol belum egaliter.

3. Faktor Sirkulasi Elit Politik

Pilkada langsung pasca reformasi telah menciptakan pertarungan elit politik lokal untuk memperoleh kekuasaan. Kontestasi elit politik lokal dalam memperoleh, menjalankan serta mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan tersebut menyebabkan sirkulasi elit politik di Kabupaten Garut berjalan sangat dinamis. Banyaknya elit politik yang terlibat dalam pencalonan Pilbup Garut

Tahun 2013, baik dari jalur parpol maupun perseorangan dan ketatnya persaingan diantara mereka mengkonfirmasi hal tersebut.

Jalur perseorangan menjadi sarana bagi elit yang tidak memerintah di tengah masyarakat untuk bertarung memperebutkan jabatan Bupati/Wakil Bupati. Munculnya calon perseorangan dalam sirkulasi elit politik di Kabupaten Garut, diantaranya disebabkan oleh :

Pertama, munculnya kelas menengah baru. Kelas menengah dalam konteks Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terspesialisasi sehingga memiliki derajat independensi ekonomi-politik tersendiri. Abugaza mendefinisikan kelas menengah sebagai “kelompok masyarakat yang independen dan rasional dalam berpolitik secara aktif maupun pasif”. Kelas menengah kemudian menjelma sebagai masyarakat kritis berkat hadirnya media sosial karena media tersebut memberi ruang publik alternatif untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan (Jati, 2016 : 149). Menurut Dedi Suryadi munculnya kelas menengah tidak terlepas dari pergeseran kultur di Garut, kondisi yang tidak tidak begitu terpelajar berubah dengan banyaknya kampus di Kabupaten Garut.

Partisipasi politik kelas menengah ini dilakukan dalam bentuk konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional, selain pemberian suara yang sangat terlihat di Kabupaten Garut adalah dengan banyak munculnya kelompok kepentingan dalam wujud Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jumlah ormas/LSM di wilayah Kabupaten Garut sebanyak 461 unit, dari sebanyak itu 50 diantaranya ormas *mainstream* seperti PCNU, PD Muhammadiyah, Persatuan Islam dan lain-lain (Hidayat, 2015 : 226). Sebagian kelas menengah yang menjadi aktivis/partisipan dalam kelompok kepentingan atau yang dulunya hanya sebagai penonton kemudian mencoba mencalonkan diri dari jalur perseorangan. Dari 22 pasangan calon yang mendaftar, sebagian besar berprofesi sebagai pengusaha/wiraswasta, lalu PNS/Pensiunan PNS, Kepala Desa, Karyawan BUMN/BUMD, Dosen, Mubaligh, dan anggota TNI. Dimana 59% diantaranya

berpendidikan SMA/ sederajat, 13,6% berpendidikan S1, 25% berpendidikan S2, dan 2,3% pendidikannya S3, dengan pengalaman organisasi yang beragam.

Melihat fenomena di atas, penulis menganggap dengan adanya peningkatan kelas menengah baru (akademisi, pengusaha, profesional, dan birokrat) di Kabupaten Garut menyebabkan peningkatan partisipasi aktif dalam kegiatan politik, seperti dalam membentuk/bergabung dalam kelompok kepentingan/LSM, menjadi partisan parpol, berdemonstrasi, maupun aktif mencalonkan diri menjadi Bupati/Wakil Bupati dari jalur perseorangan. Terjadinya situasi tersebut diantaranya disebabkan oleh bertambahnya jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Garut, adanya perbaikan pendidikan, perkembangan media komunikasi massa, dan industrialisasi di Kabupaten Garut.

Kedua, pelayanan publik dan pelayanan sipil yang tidak memuaskan masyarakat. Calon perseorangan pada Pilbup Garut menganggap Bupati Garut yang memerintah kurang baik dalam memberikan pelayanan publik dan pelayanan sipil kepada masyarakat Garut. Salah satu alasan pencalonan mereka adalah untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan yang dibuat bupati terdahulu. Mentalitas pegawai untuk melayani dan konflik internal di birokrasi salah satu penyebab kurang baiknya layanan pemerintah tersebut. Sirojul Munir menyebutkan bahwa penyebab lemahnya layanan sipil dan publik adalah "kualitas pemimpin yang tidak memiliki inovasi dan kreativitas. Misalnya pelayanan sipil dalam pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang masih sentralistis di Kabupaten, padahal bisa di Kecamatan". Menurut Jusman Iskandar pemerintahan daerah berjalan berdasarkan rutinitas saja, tidak ada perubahan berarti dalam kesejahteraan, pekerjaan, layanan kesehatan dan pendidikan. Semua berjalan karena pemerintah pusat memberikan uang, seperti program sekolah gratis dan program raskin. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya ke Cipanas berasal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan kata lain

“wajah Garut yang nambah itu restoran, pertokoan., *tea house*, aksesoris yang sifatnya bedak, tapi yang fundamental itu tidak berubah”.

Ketiga. konflik elit politik lokal. Selain konflik internal parpol seperti telah dijelaskan sebelumnya, elit politik lokal di Garut juga mengalami sejumlah konflik politik lain, seperti konflik politik antara Bupati Aceng Fikri dan Wakil Bupati Dicky Candra dan pemakzulan Bupati Aceng Fikri sebelum Pilbup Garut Tahun 2013.

Fatah mendefinisikan konflik politik sebagai konflik yang berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan-kebijakan umum (*public issue and policies*). Selain itu, konflik politik juga berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, dengan proses politik dan pemerintahan. Konflik politik adalah sesuatu yang inheren dalam setiap sistem politik. Tidak ada sistem politik yang steril dari realitas konflik politik. Konflik politik adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat. Aceng Fikri dan Dicky Chandra menjadi Bupati dan Wakil Garut dari jalur perseorangan setelah memenangkan Pilbup Garut Tahun 2008 Putaran II dengan memperoleh suara terbanyak 535.289 suara (55,8%), mengalahkan pesaingnya yaitu Rudi dan Oim yang memperoleh 423,263 suara (44,2%). Pasangan Aceng Fikri - Dicky Candra ternyata tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya yang berakhir pada 23 Januari 2014. Dicky Candra mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPRD Garut pada tanggal 7 September 2011. Sedangkan Aceng Fikri diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2013 karena pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan. Pimpinan parpol di Kabupaten Garut berpendapat bahwa perpecahan antara Aceng Fikri dan Dicky Chandra terjadi karena hubungan emosional yang tidak terbangun dengan jelas, disamping faktor kematangan dalam berpolitik yang belum matang dengan adanya kecemburuan sosial antara bupati dan wakil bupati, serta pembagian kekuasaan yang tidak berjalan diantara mereka. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jusman Iskandar bahwa konflik tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya pembagian tugas dan kewenangan antara bupati dan wakil bupati, wakil

bupati hanya diberikan peran seremonial seperti menghadiri rapat, dan upacara. Sumber konflik juga berkaitan dengan harga diri dan uang.

Lucky Lukmansyah menilai bahwa gerakan pemakzulan Aceng Fikri adalah murni gerakan sosial yang muncul ditengah masyarakat Garut akibat akumulasi kekecewaan masyarakat Garut terhadap ketidakmampuan Aceng Fikri sebagai Bupati pada saat itu, adapun kasus nikah singkatnya hanya sebagai celah/pemicu saja. Ungkapan yang sama disampaikan oleh Ade Ginanjar bahwa “gerakan sosial itu murni karena sudah berkaitan dengan moral, tidak ada kepentingan-kepentingan politik”. Sedangkan Sirojul Munir dan Agus Hilman lebih menekankan pada faktor arogansi Bupati Aceng Fikri dalam menghadapi kasus tersebut sehingga gerakan tersebut terus bergulir.

Menurut penulis gerakan pemakzulan tersebut tidak sebatas gerakan sosial yang berbasis moral saja, akan tetapi sudah menjadi gerakan politik untuk melengserkan Aceng Fikri dari kursi Bupati Garut. Alasan penulis didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh beberapa informan penelitian dan hasil penelitian sebelumnya. Ahmad Bajuri berpendapat bahwa “Kalau urusan politik pasti ada gerakan politik, dibelakangnya ada politisasi”. Pandangan serupa dikemukakan oleh Yogi Yudawibawa, “Saya yakin ada yang menunggangi. Bukan gerakan sosial secara murni. Lihatlah Pa Agus jatuh, kemudian Aceng Fikri 2012, itu semua menjelang tiga tahun pemerintahannya. Kalau saya melihat sederhana, disebut jago juga *henteu* (tidak). Karena faktor memainkannya kuat, itu saja.

Dede Kusdinar dan Enan meyakini ada keterlibatan elit politik dalam gerakan pemakzulan Aceng Fikri, Enan menambahkan bahwa “Di Garut itu mudah untuk *menyeting* masyarakat, yakin ada ada yang menunggangi untuk kepentingan Pilbup. Mangkanya di Garut harus tangan besi, harus kuat, harus ada *back-upnya*..” Sementara itu, Jusman Iskandar berpendapat bahwa yang menggerakkan itu adalah politisi-elit politik, ada juga dari masyarakat”.

Penumpang gelap yang menggunakan isu-isu gerakan untuk kepentingan merealisasi tujuan-tujuan pribadinya, para penumpang gelap tersebut adalah dua

tokoh pembentukan daerah otonom baru (DOB), yaitu Kholil Akhsan Umarzen dan Yamin Supriatna. Kedua tokoh tersebut merupakan pentolan pembentukan DOB Gatra. Dengan mendukung Aceng Fikri menjadi bupati tahun 2008, mereka berharap agar aceng Fikri memperjuangkan obsesi terbentuknya DOB tersebut, tetapi dalam kenyataan Aceng Fikri tidak seperti yang diharapkan, dan karena kecewa keduanya menyepsonori pemakzulan aceng Fikri. Kholil Aksan Umarzen maju dalam Pilbup Garut Tahun 2013 sebagai calon wakil bupati, mendampingi calon bupati Nadiman, yang diusung oleh gabungan parpol, yaitu : PKNU, PPNUI, PKPB, Partai Buruh, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, PIS, PDP, PDK, Partai Pelopor, PNBK, PNIM, PPI dan PMB. Sedangkan Yamin Supriatna menjadi calon bupati dari jalur perseorangan berpasangan dengan Dadan Ramdani.²¹

Menurut penulis rangkaian konflik elit politik yang terjadi Kabupaten Garut menyebkan sebagian elit yang tidak memerintah, baik itu yang berasal dari birokrasi atau masyarakat memanfaatkan kondisi konflik tersebut untuk kepentingan pencalonan pada Pilbup Tahun 2013. Munculnya birokrat/mantan birokrat dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pelengseran pada pencalonan perseorangan pada Pilbup Tahun 2013 membuktikan hal tersebut.

Sirkulasi elit politik di Kabupaten Garut selama ini menurut Jusman Iskandar kurang berjalan baik disebabkan : *Pertama*, mayoritas elit politiknya tidak bersikap sebagai negarawan. *Kedua*, komunkasi yang dibangun oleh elit politik dengan masyarakat tidak terpelihara dengan baik sehingga masyarakat tidak terlalu mengenal mereka. *Ketiga*, ketokohan yang dibangun oleh elit politik bersifat feodalistik dan tidak mengakar ke bawah, sehingga masyarakat tidak terikat dengan elit politik.

Kondisi ini menurut penulis memungkinkan elit politik yang tidak memerintah (elit di masyarakat) untuk mencoba tampil merebut kekuasaan dari elit politik dengan alternatif kebijakan yang dimilikinya untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat Garut melalui jalur perseorangan pada Pilbup Garut Tahun 2013.

²¹. KPU Kabupaten Garut. (2014). *Dialektika Pemilu Bupati Garut Tahun 2013*. Garut : KPU Kabupaten Garut, h 84-85

D. KESIMPULAN

Munculnya calon perseorangan pada Pilbup Garut Tahun 2013 disebabkan oleh 3 faktor, yaitu *Pertama*, Faktor pelembagaan parpol yang lemah, yang ditandai oleh : (a) Ketidakstabilan persaingan antar partai politik, dari hasil pemilu 2004-2014 parpol-parpol di Kabupaten Garut mengalami votalitas pemilu yang cukup tinggi. Votalitas pemilu tertinggi terjadi di dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar, (b) Parpol belum mengakar di masyarakat, dimana hubungan parpol dengan pemilihnya begitu lemah, tidak semua konstituen parpol pada pemilu 2009 memilih kandidat bupati yang diusung oleh parpol pilihannya tersebut, masyarakat kurang memiliki keterikatan ideologis dan program dengan parpol, pemungutan suara pada saat Pilbup Garut Tahun 2013 berdasarkan personalistik calon, dan jaringan ormas parpol belum memadai. (c) Legitimasi parpol yang lemah, terlihat dengan adanya konflik internal parpol yang terjadi di Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PPP. (d) Dominannya kepentingan personalistik pemimpin parpol. *Kedua*, faktor proses rekrutmen parpol yang eksklusif dan sentralistis. Pada umumnya parpol terbuka bagi calon kepala daerah, akan tetapi tetap mendahulukan calon internal parpol. Kultur parpol yang belum demokratis, sentalistis dan adanya mahar politik menjadi penghambat orang luar parpol untuk mencalonan diri dari jalur parpol, dan akhirnya memilih jalur perseorangan. *Ketiga*, faktor sirkulasi elit politik lokal. Calon perseorangan muncul seiring dengan bertambahnya kelas menengah baru di Kabupaten Garut, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan pelayanan sipil yang diberikan bupati sebelumnya, dan rentetan konflik elit politik yang terjadi menjelang Pilbup Garut Tahun 2013. Terdapat elit politik yang memanfaatkan momentum pelengseran bupati sebelumnya untuk kepentingan pencalonannya pada Pilbup Tahun 2013, salah satunya dari calon perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.

- Abdullah, A. (2017). Diplomatic Relations between Indonesia-Australia Since Whitlam, Fraser, Until Hawke Era in An Attempt To Establish Political Stability in Southeast Asia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(2), 237-252. doi:10.26811/peuradeun.v5i2.135
- Adhima, M R & Bahri, S. (2013). Konflik Politik dalam Pemerintahan Lokal : Studi Kasus Pengunduran dii Wakil Bupati Jalur Perseorangan di Kabupaten Garut Tahun 2011. Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Diakses 11 Desember 2017, dari: https://slidedokumen.com/konflik-politik-dalam-pemerintahan-lokal-studikasus_5a19729f1723dda0ebdf42fb.html.
- Ansori, T. (2014). Lipatan Sejarah Menuju Pendopo Tahun 2013, Dalam KPU Kabupaten Garut.2014. *Dialektika Pemilu Bupati Garut Tahun 2013*. Garut : KPU Kabupaten Garut.
- Aspinal, E & Mas'udi, W. (2017). The 2017 Pilkada (Local Elections) in Indonesia : Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks.
- Bochel, H & Denver, D. (2008). Minor Parties and Independent in Times of Change : Scottish Local Elections 1974 to 2007, *Local Government Studies*
- Brancati, D. (2008). Winning Alone: The Electoral Fate of Independent Candidates Worldwide . *The Journal of Politics*
- Budiarti, AP. (2015). The Institutionalization of Political Party System Under Democratic System In Indonesia (1998-Now). *Jurnal Penelitian Politik*
- Frensiska, R. (2015). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah : Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal RECCHTSVINDING 4* : 105-179.
- Gendzwill, A. (2012).Independent Mayors and Local List in Large Polish Cities : Towards a Non-partisan Model of Local Government. *Local Government Studies*
- Hanafi, RI. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*
- Harahap, HI. (2013). Politik Kepala Daerah Perseorangan Memperbesar Kekuasaan. *Jurnal POLITEI*
- Haryanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*
- Hazan, RY & Rahat, G .(2014). Seleksi Calon : Metode dan Konsekuensi. Dalam Katz, Richard S & Crotty, William. *Handbook Partai Politik*. hal. 178-185. Bandung : Nusa Media
- Heidar, K. (2014). Keanggotaan dan Partisipasi Partai. Dalam Katz, Richard S & Crotty, William. *Handbook Partai Politik*. hal. 493-513. Bandung : Nusa Media
- Hidayat, N. (2015). Gerakan Sosial Pemakzulan Bupati Garut Tahun 2012-2013. Disertasi UNPAD.
- Higley, J & Pakulski, J. (2007). Elite and Leadership Change in Liberal Democracies. *Comparative Sociology*

- Hijino, KVL. (2013). Liabilities of Partisan Labels : Independents in Japanese Local Elections. *Social Science Japan Journal*
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Institute for Strategic Initiatives, (2013). *Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye*. Institute for Strategic Initiatives
- Ishiyama, J, Anna B., & Angela S. (2011). Political Parties, Independents and the Electoral Market in sub-Saharan Africa". *Party Politics*
- Jati, WR. (2016). Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial : Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014. *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*
- KPU Kabupaten Garut. (2008a). *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2008 Putaran Pertama di KPU Kabupaten Garut*. Garut : KPU Kabupaten Garut.
- Mainwaring, S & Torcal, M. (2014). Institutionalisation of Party Systems and Party Theory After Democratization. Dalam Katz, RS & Crotty, W. *Handbook Partai Politik*. Bandung : Nusa Media
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Noor, Firman. (2007). Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik, dan Dampaknya. *Jurnal Penelitian Politik*
- Norris, P. (2014). Perekrutan. Dalam Katz, RS & Crotty, W. *Handbook Partai Politik*. hal. 149. Bandung: Nusa Media

- Obasa, D., & Adebule, J. (2017). The Challenges of Higher Education in Growing Dialogue Culture and Understanding Cultural Pluralism. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), 401 - 414. doi:10.26811/peuradeun.v5i3.183
- Sanusi, S., Yusuf, R., & Jannah, M. (2017). The Understanding of Political Elites on the Consensus of Nation and State Life. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(2), 253-272. doi:10.26811/peuradeun.v5i2.147
- Saraswati, R. (2010). Implikasi Calon Perseorangan sebagai Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2012). Hak Azazi Manusia dan Syariat Islam di Aceh. *International Conference Islam and Human Right*, 123-142. Yogyakarta: MSI UII.
- Thaha, Rasyid & Haryanto, (2017). Independent Candidate in the Concurrent Regional Election in South Sulawesi : What is Independent and Why ?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Ufen, Andreas. (2008). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia : lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand. *The Pacific Review*
- Ulfah, IF. (2012). Calon Independen dalam Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2011. Tesis UNDIP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Varma, SP. (1999). *Teori Politik Modern*. Jakarta : Rajawali Pers
- Wulandari, L.(2014). Politik Biaya Tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Perludem. Diakses 24 Juli 2017, dari: https://www.academia.edu/6980685/Laporan_Penelitian_Biaya_Politik_Pilkada_Studi_Kasus_Pilkada_Garut_Lia.
- Zanabazar, A., Ukhnaa, M., Xuexi, H., Bira, S., Jigjiddorj, S., & Pagvajav, O. (2017). The Current Situation and Trend of the Labor Force of Mining Sector in Mongolia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), 341-350. doi:10.26811/peuradeun.v5i3.175

